

FORMASI DAN NEGOSIASI IDEOLOGI DALAM NOVEL ARUS BAWAH KARYA EMHA AINUN NADJIB: KAJIAN HEGEMONI GRAMSCI

Jakaria Jakaria

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
e-mail: jakaria@unimed.ac.id

Heny Anggreini

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
e-mail: anggreiniheny@unimed.ac.id

Muharrina Harahap

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
e-mail: muharrina@unimed.ac.id

ABSTRAK

Novel Arus Bawah mencerminkan perjuangan kelompok subaltern terhadap kelompok penguasa yang menahan dan menghalangi kemerdekaan dan kemakmuran masyarakat yang telah merdeka. Situasi ini menjadikan para intelektual, termasuk pengarang, melakukan perlawanan agar terbebas dari ketertindasan penguasa yang otoriter. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis formasi dan negosiasi ideologi yang ditemukan di dalam novel Arus Bawah agar dapat dipahami kontestasi ideologi yang dilakukan pengarang sebagai ekspresi kaum intelektual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep Hegemoni Gramsci. Pengumpulan data menggunakan teknik simak. Data dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu 1) mengklasifikasikan data; 2) memilih data yang relevan dengan masalah; 3) melakukan analisis data dengan konsep Gramsci; 4) membuat laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formasi ideologi antara tokoh Punakawan (refleksi dari masyarakat subaltern) dengan tokoh Pak Kades dan Jogoboyo (refleksi dari penguasa/ pemerintah), yaitu tokoh Punakawan menghadirkan ideologi nasionalis-humanis yang terwujud dalam nilai Pancasila terhadap ideologi dominan yang terefleksi melalui tokoh Pak Kades dan Jogoboyo, yaitu militerisme. Nasionalis-Humanisme merupakan ideologi yang ingin dinegosiasikan pengarang sebagai bentuk penawaran kepada masyarakat pembaca tentang cara pandang baru, yaitu memiliki moral yang baik dan memiliki cara berpikir yang berguna untuk kepentingan masyarakat agar dapat memperbaiki kehidupan.

Keywords: hegemoni, ideologi, intelektual organik

1. PENDAHULUAN

Membaca novel Arus Bawah seperti halnya melihat Indonesia di masa lampau dan yang akan datang. Novel ini menyuguhkan fenomena pada suatu rezim yang sangat otoriter, yaitu Orde

Baru, sekaligus sebagai refleksi bagi rezim yang akan datang. Refleksi yang dimaksud seolah dibenarkan melalui tahun dicetaknya kembali novel tersebut. Novel Arus Bawah menceritakan tentang hilangnya

pemimpin Punakawan, yaitu Semar dari Desa Karang Kedempel. Ketiga Punakawan lainnya (Gareng, Petruk, dan Bagong) yang tak lain adalah anaknya sendiri tidak begitu mengkhawatirkan kehilangan Semar, kecuali Gareng. Gareng merasa bahwa hilangnya Semar merupakan petanda akan hilangnya rasa kemanusiaan di hati masyarakat Karang Kedempel. Sementara bagi Petruk dan Bagong, ada dan tiadanya Semar tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi masyarakat. Meskipun demikian, selalu tersemayem tanda tanya di dalam hati dan pikiran mereka akan hilangnya Semar.

Kehilangan Semar sangat dirasakan oleh Gareng karena Semar selalu menjadi penyejuk setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Karang Kedempel. Gareng yang panik kemudian berusaha mencari melalui pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya yang dianggap Petruk dan Bagong sangat filosofis. Berbeda dengan Petruk dan Bagong, yang menanggapi hilangnya Semar dengan santai. Petruk terlihat tidak peduli, akan tetapi sangat kompromis terkait persoalan-persoalan yang menjadi kekhawatiran Gareng. Sementara Bagong, dibalik tindakannya yang selalu menunjukkan ketidaksopanan dan ketidakpeduliannya, ia sesungguhnya sangat mengerti persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan, ia dianggap sebagai bayangan Semar karena selalu memberikan aksi nyata terhadap setiap persoalan, seperti pentingnya semangat kesetaraan dan juga mendobrak budaya “menghamba” yang sudah ‘ajeg’ di masyarakat Karang Kedempel. Meski kerap dianggap berbeda, sikap Bagong bisa diartikan sebagai representasi semangat umat manusia untuk berani ‘memulai’ sesuatu ketika melihat ketimpangan maupun penderitaan.

Novel *Arus Bawah* merupakan karya Emha Ainun Nadjib (selanjutnya dipanggil Cak Nun) yang pertama kali terbit dalam bentuk cerita bersambung di harian *Berita Buana* tahun 1991. Novel ini tidak hanya mengisahkan tentang para Punakawan di Dusun Karang Kedempel, akan tetapi para Punakawan yang berani membongkar ‘kebusukan’ sistem yang terjadi di Karang Kedempel. Keberanian tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus perlawanan yang dilakukan oleh pengarang melalui karyanya sebagai kaum intelektual organik terhadap penindasan. Perlawanan yang dilakukan tidak dengan cara kekerasan atau kekuasaan, melainkan dengan mengontestasikan dan menegosiasikan ideologi. Perlawanan dengan cara tersebut yang kemudian tanpa disadari diterima dan bisa memengaruhi pandangan dan kultural masyarakat yang menurut Gramsci sebagai hegemoni.

Negosiasi ideologi pengarang melalui tokoh Punakawan merupakan bentuk resistensi terhadap tokoh Pak Kades dan Pak Jogoboyo—refleksi dari penguasa/pemerintah. Jika tidak dilakukan perlawanan, penguasa (tokoh Pak Kades dan Pak Jogoboyo) sebagai kelompok dominan akan terus berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mengonstruksi kelompok subaltern melalui pembungkaman, aturan-aturan, maupun tindakan yang menjadikan masyarakat Karang Kedempel, sadar atau tidak sadar, menjadi masyarakat yang terkonstruksi. Sebab, ada aspek-aspek kebudayaan (sosial, budaya, agama, dan politik) menjadi modal untuk melanggengkan kekuasaan atau memperkuat konstruksi mereka terhadap cara pandang masyarakat.

Tahun 1994, *Arus Bawah* dicetak dalam bentuk buku oleh penerbit

Bentang. Kemudian tahun 2014 dan 2019 dilakukan penerbitan kembali oleh penerbit Bentang dengan adanya perubahan pada desain cover. Novel ini semakin menarik untuk diteliti karena momen penyetakan kembali oleh penerbit Bentang dilakukan pada tahun-tahun politik, tepatnya pada saat pemilihan calon presiden Indonesia, yaitu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilihan waktu penyetakan kembali, sepertinya, memiliki maksud tersembunyi yang ingin mengatakan bahwa novel *Arus Bawah* masih dan terus relevan untuk diperbincangkan di setiap berlangsungnya kekuasaan. Selain itu, dominasi pakem Mahabarata yang kuat mendorong Cak Nun untuk mengadaptasi realitas menjadi cerita pewayangan sebagai pintu masuk dalam menganalogikan budaya yang mampu memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Hal itulah yang menjadi dasar pemilihan novel *Arus Bawah* sebagai objek material.

Berdasarkan penjelasan di atas, persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses negosiasi ideologi dalam novel *Arus Bawah* yang berkaitan dengan ideologi masyarakat pada waktu novel tersebut diciptakan. Persoalan tersebut akan dikaji menggunakan konsep hegemoni Gramsci. Dengan menjawab persoalan tersebut, terjelaskan bahwa kontestasi dan negosiasi ideologi yang dilakukan oleh pengarang merupakan bentuk aspirasi dari kaum intelektual (mahasiswa, pengarang, peneliti) untuk membentuk masyarakat yang kritis dan bermoral.

Penelitian terhadap novel *Arus Bawah* telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Satindra (2020) membahas tentang kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru.

Kemudian, penelitian Wijayanto (2020) membahas tentang nilai pendidikan karakter. Penelitian selanjutnya adalah terkait dengan kajian Gramsci, pernah dilakukan oleh Anggreini (2019); Anggreini dkk. (2020); Harahap dkk. (2024). Ketiga penelitian ini menjelaskan bahwa karya sastra adalah arena perjuangan ideologis. Pengarang menegosiasikan ideologinya terhadap ideologi dominan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap novel *Arus Bawah* menggunakan kajian Gramsci layak dilakukan karena memberikan kontribusi, yaitu menjelaskan tentang pemerintahan Orde Baru yang menekan masyarakat kelas bawah atau disebut Gramsci sebagai kaum subordinat. Melalui novel *Arus Bawah*, Cak Nun melakukan perlawanan, bersuara seperti halnya Gus Mus (pada penelitian Anggreini dkk., 2020) pada sistem pemerintahan Orde Baru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ideologi dan Hegemoni

Konsep hegemoni Gramsci merupakan sumbangan terbesarnya terhadap teori politik. Teori tersebut berawal dari konsep Marxian tentang masyarakat sipil sebagai momen struktur. Dalam penjelasannya, Marx menyebut masyarakat sipil dan negara sebagai antitesis. Masyarakat sipil adalah bagian penting dari negara (tatanan politik), tetapi menjadi bagian subordinat. Oleh karena itu, antitesis dasar dibentuk oleh struktur dan superstruktur (masyarakat sipil dan negara). Bisa dikatakan, masyarakat sipil menguasai negara karena keseluruhan hubungan dari masyarakat sebagai pondasi munculnya superstruktur yuridis dan politis (Marx dalam (Patria & Arief, 2009, hal. 36).

Konsep Gramsci terkait masyarakat sipil tidak terbatas pada momen struktur semata, melainkan pada superstruktur yang bersifat hegemonik. Terdapat hubungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual dan spiritual, serta ekspresi politik yang melampaui struktur (Patria & Arief, 2009, hal. 37). Gramsci mengkategorikan superstruktur menjadi dua tingkatan, yaitu (1) masyarakat sipil, yaitu sekumpulan organisme yang sering disebut “privat” dan (2) masyarakat politik atau negara (Patria & Arief, 2009, hal. 34). Kedua tingkatan ini saling berhubungan, di satu sisi, fungsi hegemoni dijalankan oleh kelompok dominan dalam setiap masyarakat, sementara di sisi lain, dominasi langsung diwujudkan oleh negara dan pemerintah.

Konsep Gramsci tentang hegemoni, negara, dan masyarakat sipil dapat mendorong setiap orang untuk berpikir kritis tentang struktur negara dan suprastruktur. Proses hegemoni terjadi ketika masyarakat sipil atau proletariat mengikuti cara hidup dan berpikir kelompok elit yang mengeksploitasi dan mendominasinya. Hal ini menjadikan kehidupan mereka terhegemoni secara intelektual dan moral.

Pengarang termasuk ke dalam bagian dari intelektual organik yang berada dalam bagian terhegemonik. Oleh karena itu, seluruh aktivitas seni-budaya, termasuk sastra, akan berfokus pada satu tujuan utama—menciptakan iklim kultural yang mendorong persatuan sosial melalui keberagaman dan keteraturan kehendak. Menurut (Faruk, 2013, hal. 107), masyarakat dapat melakukan tindakan ini sebagai tindakan historis. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menyatupadukan kekuatan-kekuatan sosial yang

bertentangan, karya sastra juga berfungsi sebagai tempat bagi kelompok yang berada di bawah kekuasaan untuk menentang tindakan politik dalam upaya mereka untuk menolak unsur-unsur ideologis yang akan datang (Faruk, 2013, hal. 74).

Karya sastra melahirkan diskursus hegemoni yang memiliki formasi ideologi sebagai bentuk kontradiskursus dari hegemoni kaum dominan. Formasi ideologi tidak hanya membahas ideologi di dalam teks, melainkan juga berada di dalam kehidupan masyarakat karena sifatnya yang kolektif dan berada di dalam sistem besar, yang memberikan orientasi kepada manusia (Homba & Dawa, 2015, hal. 84). Karena bersifat kolektif, ideologi memiliki pengikut. Ideologi merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kajian hegemoni Gramsci. Ideologi dimaknai sebagai suatu kesadaran dan pemahaman yang menjadi pandangan dunia (Salam, 2020, hal. 110). Ideologi berada di wilayah superstruktur yang menjelma ke dalam praktik-praktik sosial setiap orang, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi, perusahaan komersial, dan lain-lain (Harjito, 2022, hal. 25; Storey, 2003, hal. 4).

Dalam karya sastra, diskursus ideologi dipresentasikan sebagai penegasian bahwa kekuasaan berasal dari persetujuan yang dicapai melalui kepemimpinan ideologis dan politik dan bukanlah dominasi kelas tertentu yang menguasai kelas lain (Hatmoko dkk., 2014, hal. 3). Menurut Bockock (dalam Hatmoko dkk., 2014, hal. 3), terdapat tiga ide penting tentang konsep hegemoni, yaitu (1) hegemoni terjadi ketika kaum dominan berhasil memengaruhi kelompok yang didominasi (subaltern) untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya yang

dimiliki oleh kaum dominan; (2) hegemoni yang dianggap wajar dapat menyebar dan diterapkan; (3) adanya upaya oleh kaum dominan dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya dan ideologi untuk menjadikan pihak yang didominasi bungkam dan patuh.

Ideologi harus terus disebarkan untuk mencapai hegemoni. Gramsci berpendapat bahwa penyebaran ideologi tidak dapat terjadi secara mandiri tanpa bantuan lembaga sosial yang berfungsi sebagai pusat, seperti lembaga penerbitan dan sekolah (Faruk, 2013, hal. 47). Hegemoni merupakan konsep kenyataan yang tersebar luas di masyarakat sehingga ideologi dapat mendominasi kehidupan (Hatmoko dkk., 2014, hal. 3) Ideologi disebarkan oleh kaum dominan kepada kaum subaltern, yang diterima secara wajar sehingga menyebar dan dipraktikkan.

2.2 Intelektual Tradisional dan Intelektual Organik

Hegemoni yang tersebar dan dipraktikkan itu diterima, tetapi juga ditolak oleh kaum intelektual. Gramsci menyebutkan bahwa setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat (Patria & Arief, 2009, hal. 157). Gramsci memperluas definisi kaum intelektual untuk mencakup semua orang yang bertugas dalam mengorganisasi masyarakat pada semua lapisan, baik bidang politik maupun kebudayaan. Menurut Gramsci, intelektual bukan hanya pemikir, penulis, sastrawan, seniman, melainkan juga aktivis, organisator, dan pemimpin politik. Orang-orang tersebut berguna bagi masyarakat sipil dan negara, serta sebagai teknisi, manajer, dan ahli mesin dalam alat produksi.

Gramsci berpendapat bahwa kaum intelektual terdiri atas dua, yaitu

intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional dianggap sebagai intelektual yang independen dan merdeka dari kelompok sosial yang mendominasi (Gramsci dalam Patria & Arief, 2009, hal. 162). Pikiran kelompok intelektual tradisional memisahkan intelegensinya terhadap tatanan borjuis. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa intelektual tradisional bertanggung jawab atas peran kepemimpinan intelektual dalam masyarakat (Gramsci dalam Patria & Arief, 2009, hal. 163). Intelektual tradisional dilahirkan sebagai bagian dari kelas yang berkuasa atau dominan. Gramsci mencontohkan golongan tersebut di antaranya: para rohaniawan, manusia literer, filsuf, seniman, dan artis.

Sementara itu, intelektual organik berhubungan langsung dengan cara produksi yang dominan (Gramsci dalam Patria & Arief, 2009, hal. 159). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kelas sosial yang berasal dari basis produksi ekonomi secara alami akan menghasilkan kelompok intelektual tertentu yang dapat membangun solidaritas dan kesadaran tentang peran mereka dalam bidang ekonomi dan sosial politik. Intelektual organik berasal dari kelas tertentu, yaitu kelas pekerja yang mendukung perjuangan pekerja atau kelas borjuis yang mendukung kelompoknya (Patria & Arief, 2009, hal. 161) (Patria dkk., 2009: 161). Artinya, intelektual organik adalah kelompok sosial yang menyadari posisi dan peran mereka dalam ekonomi, sosial, dan budaya, dan terus melakukan "perjuangan" demi kepentingan kelasnya. Oleh karena itu, jika kelas pekerja ingin keluar dari kelasnya untuk mengambil alih kepemimpinan negara dan meningkatkan kesadaran politik melalui reformasi moral dan intelektual,

mereka harus mendirikan kelas intelektualnya sendiri. Adanya kesadaran kritis menjadi dasar penting bagi “intelektual organik” di dalam *civil society*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengarah pada analisis isi (Udasmoro, 2012, hal. 36). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul *Arus Bawah* karya Emha Ainun Nadjib, yang datanya berupa, kata, dialog, dan kalimat. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik simak (Sudaryanto, 2015, hal. 203). Teknik ini paling sesuai karena data yang dianalisis berupa kata dan dialog (Faruk, 2012, hal. 24). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah: 1) mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan; 2) memilih data yang relevan dengan masalah, pertanyaan, dan tujuan penelitian; 3) melakukan analisis data dengan konsep yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu ideologi, hegemoni, dan intelektual organik untuk mengetahui ideologi-ideologi yang dinegosiasikan oleh pengarang terhadap ideologi dominan; 4) membuat laporan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Berdasarkan pembacaan terhadap novel *Arus Bawah* karya Emha Ainun Nadjib, ditemukan bahwa tokoh-tokoh dalam cerita merepresentasikan ideologi yang berbeda berdasarkan posisi sosial dan peran dalam struktur masyarakat. Tokoh Punakawan merepresentasikan intelektual organik dalam kelompok subaltern. Tokoh ini memantafestasikan formasi ideologi yang meliputi

nasionalisme, sosialisme, dan humanisme. Ideologi dominan yang melekat pada tokoh Punakawan adalah nasionalisme-humanisme yang menunjukkan orientasi pemikiran dan perjuangan tokoh terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dalam menghadapi ketimpangan sosial.

Sebaliknya, tokoh Pak Kades Jogoboyo merepresentasikan kelompok dominan, yakni pemerintah. Tokoh ini memantafestasikan formasi ideologi militerisme dan Pancasila, dengan militerisme sebagai ideologi dominan yang mewarnai sikap dan kebijakan tokoh tersebut. Dominasi militerisme pada tokoh Pak Kades menunjukkan kecenderungan otoriter dalam pengelolaan kekuasaan, yang sering kali berseberangan dengan nilai-nilai humanisme yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh subaltern, seperti Punakawan.

4.2 Pembahasan

a. Identifikasi Historis-Kultural

Pengarang

Novel *Arus Bawah* menggambarkan konflik yang terjadi selama Orde Baru, yaitu ketegangan masyarakat terhadap kaum dominan (pemerintah) yang otoriter. Budaya patronase (hubungan timbal-balik antara bos dan anak buah) menundukkan perwakilan rakyat dengan menghalangi suara kritis. Politik perizinan, UU subversi, cekal, dan pencabutan SIUPP membentuk logika kepatuhan (Gusmian, 2004, hal. 3–4). Otoriterianisme rezim Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya menggunakan berbagai cara.

Pertama, pembungkaman terhadap pers. Setelah tragedi G30SPKI, banyak surat kabar yang diretas dengan alasan membersihkan antek-antek PKI, termasuk pers. Pers kampus juga tidak luput dari pembredelan sehubungan

dengan penerapan normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi mahasiswa. Banyak surat kabar yang diberhentikan SIUPP-nya dari tahun 1980 hingga awal 1990-an karena dianggap mengganggu stabilitas nasional dan mengandung SARA (Gusmian, 2004, hal. 80). Beberapa surat kabar mengalami pemberedelan, seperti Sinar Harapan (1986) diberedel karena menulis tentang devaluasi rupiah dan menunjukkan upaya pemerintah untuk mencabut izin dari 44 monopoli impor. Beberapa penerbit kampus, termasuk Almamater, Gelora Mahasiswa UGM, dan Derap Mahasiswa IKIP Yogyakarta dibekukan menjelang pemilu 1983. Majalah Jakarta mengalami kasus serupa ketika melaporkan tragedi Timor-Timor, seperti penembakan tentara Indonesia terhadap demonstran di pemakaman Santa Cruz di Dili pada tahun 1991.

Kedua, mendominasi sebagai bentuk strategi. Rezim Orde Baru berusaha mengonsolidasi kekuasaan dengan menyingkirkan unsur-unsur PKI dari birokrasi melalui pembatasan rekrutmen baru dan percepatan masa pensiun. Perwira militer direkrut untuk mengisi jabatan strategis dalam birokrasi dengan gaya komando militer guna memperkuat loyalitas terhadap penguasa. Kemudian, penerapan sistem birokrasi yang lebih mengabdikan kepada penguasa daripada rakyat (Gusmian, 2004, hal. 70).

Ketiga, birokrasi sebagai lahan korupsi. Rezim Orde Baru berhasil mewujudkan sistem birokrasi yang kuat, tetapi tidak profesional. Sistem tersebut sengaja dibangun untuk mengendalikan pembangunan sehingga birokrasi mendominasi masyarakat dan memunculkan sistem politik yang birokratis. Hal ini menjadikan kekuasaan dan partisipasi hanya terbatas pada

lingkungan aparaturnya pemerintahan. Akibatnya, sistem tersebut mudah disusupi karakter pribadi, nepotisme, serta menjadi sarang praktik korupsi dan manipulasi (Gusmian, 2004, hal. 76).

Keempat, melakukan kekerasan. Selain melakukan pemberedelan dan mengaktifkan sistem birokrasi, rezim Orde Baru juga melakukan berbagai tindakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan, seperti membatasi kebebasan rakyat dan menindas siapa saja yang berani menentang. Kehidupan politik ditekan dan rakyat tidak berdaya di bawah aturan yang hanya menguntungkan elit. Secara sosial pula, masyarakat terbelenggu dalam kemiskinan dan ketakutan (Gusmian, 2004, hal. 112).

Sikap otoriterianisme tersebut menggerakkan kaum intelektual dengan melakukan berbagai upaya agar ideologi militerisme tersebut runtuh. Cak Nun, sebagai seorang penyair, berani menentang perilaku tersebut lewat karya sastra. Novel *Arus Bawah* yang ditulisnya merupakan bentuk perlawanan atas ideologi militerisme. Ia ingin membangunkan kesadaran rakyat akan pentingnya kebebasan berpikir dan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Walaupun berat dan penuh risiko, upaya-upaya perlawanan seperti ini adalah jalan satu-satunya agar rakyat terbebaskan dari belenggu otoritarianisme.

b. Ideologi Pengarang

Emha Ainun Nadjib atau biasa dikenal dengan sebutan Cak Nun termasuk orang yang telah berproses cukup panjang dalam pergulatan batin dan pemikiran mengenai keadaan dan keterbatasan. Kegiatan berkontemplasi tersebut bermula dari kebiasaan orangtuanya yang selalu dijadikan sumber solusi atas keluhan dan masalah

para tetangganya. Bahkan, kebiasaan terkait mengenal keadaan dimulai Cak Nun sejak masih berada digendongan karena selalu ikut ibunya berjalan keliling melihat para tetangga, menanyakan hal-hal sederhana, seperti masakan, keadaan sekolah anaknya, maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Kebiasaan itu yang kemudian secara tidak sengaja membentuk sikap sosial Cak Nun.

Cak Nun kecil sudah disugahi dengan nilai-nilai agama. Sejak tamat SD, ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta dan berhasil menamatkan SMA Muhammadiyah I. Nilai-nilai agama yang didapatkannya tersebut yang menjadi pegangan Cak Nun dalam berkontemplasi mengenai hidup. Selanjutnya, ia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Namun, hanya dalam empat bulan, ia memutuskan mundur dan bergabung dengan kelompok penulis sastra muda di Persada Studi Klub (PSK). Dari sinilah pengembaraan sosial, intelektual, kultural, maupun spiritual terus dilakukannya. Ketika ia sangat produktif berkarya, namanya semakin dikenal. Berbagai tulisan berhasil dituangkannya dalam bentuk esai, puisi, cerpen, maupun novel.

Banyak judul esai maupun buku berhasil dituliskan, seperti *Dari Pojok Sejarah* tahun 1985, *Sastra yang Membebaskan* tahun 1985, *Gerakan Punakawan* tahun 1994, *Surat Kepada Kanjeng Nabi* tahun 1996, *Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya* tahun 1994, *Bola- Bola Kultural* tahun 1996, *Budaya Tanding* tahun 1995, *Titik Nadir Demokrasi* tahun 1995, *Demokrasi Tolol Versi Saridin* tahun 1997, *Kita Pilih Barokah atau Azab Allah* tahun 1997, *Menelusuri Titik Keimanan* tahun 200,

Kitab Ketentraman tahun 2001, dan *tahun 2010*. Berbagai penghargaan juga berhasil diraih berkat tulisan, salah satunya Penghargaan Satyalancana Kebudayaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2010. Penghargaan tersebut diberikan kepada seseorang atas pertimbangan bahwa penulis memiliki jasa besar di bidang kebudayaan dan hasil karyanya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

Jika dilihat judul tulisan yang dihasilkan Cak Nun dari awal kepenulisan, tulisan-tulisannya mengarah pada ideologi nasionalis-humanis. Namun, terdapat juga ideologi lain, seperti sosialisme dalam berbagai tulisannya. Ideologi-ideologi yang menjadi perhatian Cak Nun merupakan bagian dari negosiasi atas ideologi dominan yang telah menghegemoni masyarakat. Salah satu buktinya pada buku *Demokrasi La Roiba Fih* yang membahas tentang sistem demokrasi yang dianut oleh negara. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem yang membebaskan seluruh warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Prinsip utamanya memberikan ruang yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan. Tidak ada konsep penolakan atau penyingkiran terhadap siapapun. Semua wajib dihormati hak dan kebebasannya. Namun, kebebasan itu pun harus berjalan sesuai nilai-nilai moral dan aturan hukum yang berlaku. Melalui karya-karyanya, Cak Nun ingin menyampaikan pandangannya bahwa masyarakat Indonesia yang terpinggirkan pun berhak atas keadilan sosial berdasarkan prinsip kemanusiaan dan nasionalisme. Ia memperjuangkan kelompok yang tertindas agar

mendapatkan harkat dan martabat yang sama.

c. Kontestasi dan Negosiasi Ideologi Pengarang

Indonesia merupakan negara dengan menganut paham demokrasi. Bahkan, sebelum masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi sudah ada di dalamnya. Meskipun terjadi perjalanan panjang dalam diri demokrasi, sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Setidaknya, Demokrasi memberikan pemahaman bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat sehingga rakyat akan melahirkan aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak seluruh rakyat (Noviati, 2013, hal. 334). Akan tetapi, pohon kemerdekaan yang membuahkan demokrasi tidak dijalankan sepenuhnya oleh rezim orde baru, yang pada akhirnya memberikan kecemasan dan ketakutan terhadap rakyat.

Rakyat Karang Kedempel mendambakan demokrasi, kemerdekaan dan persamaan [...] penduduk Karang Kedempel sementara ini amat kurang percaya kepada hampir segala hal “di luar dirinya” negerinya atau dusunnya ini, aturan-aturan yang berlaku aneh [...] –serta jangan lagi tanya soal Pak Kades dan Jogoboyo yang punya hobi melenyapkan penduduk.

(Nadjib, 2019, hal. 42)

Tokoh Pak Kades dan Pak Jogoboyo—representasi dari penguasa/rezim—digambarkan sebagai rezim yang otoriter, yaitu menghilangkan penduduk. Penghilangan tersebut terkait orang-orang yang sangat vokal terhadap kesenjangan dan penindasan orba. Salah satu di antara orang-orang yang hilang adalah Wiji Thukul sejak 1998 (Gusmian, 2004, hal.

104). Thukul merupakan penyair yang sangat kritis. Puisi-puisinya begitu ‘telanjang’ mengkritisi sistem perburuan yang sangat tidak manusiawi—beban kerja yang sangat menguras tenaga, upah yang tidak menyejahterakan, dan jam kerja yang sangat lama.

Selama mengendalikan kekuasaannya, tragedi kemanusiaan tidak hanya dalam bentuk penyalpan sebagaimana di atas, melainkan juga penumpahan darah terhadap anak negeri. Hal ini dapat dilihat dari penumpasan antek-antek PKI, tragedi Timor-Timur, tragedi Aceh, dan tragedi kemanusiaan di tempat lainnya (Gusmian, 2004, hal. 90). Pelenyapan orang-orang yang vokal terhadap rezim merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Gramsci bahwa hegemoni dilakukan agar kekuasaan yang telah dan akan diperoleh bisa didapat atau dilanggeng (Simon, 2004, hal. 21). Pembungkaman itu tidak hanya dilakukan kepada para penyair (sastrawan), tetapi juga kepada para mahasiswa, pers, dan organisasi yang mencoba keluar dari konstruksi penguasa.

Di Karang Kedempel ini kalau kami berfikir, dianggap subversif. Kalau kami belajar memahami persoalan, dianggap pemberontakan. Padahal, telinga kami semakin tuli mendengar ratusan berita yang mencerminkan bahwa dunia ini sudah semakin pincang.

(Nadjib, 2019, hal. 53)

Kepala kami pusing oleh kemunafikan yang dibikin megah dan tampak luhur. Oleh kepandaian yang busuk. Oleh kepintaran yang bodoh. Oleh

kemajuan yang bergantung pada kebergantungan. Oleh tanam paksa yang kontemporer. Oleh hijrah paksa ratusan atau ribuan keluarga demi bendungan atau pariwisata atau pabrik-pabrik, atau listrik dan golongan menengah masyarakat [...].

(Nadjib, 2019, hal. 53)

Pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an banyak media massa yang disita izin terbitnya dengan alasan mengganggu stabilitas nasional dan mengandung SARA (Gusman, 2004, hal. 80). Media massa yang mengalami pembredelan, seperti Sinar Harapan (1986), Menjelang Pemilu 1983, dan beberapa media kampus juga dicabut izinnya, seperti Gelora Mahasiswa (UGM), Derap Mahasiswa (IKIP Yogyakarta), dan Almamater (IPB). Perilaku otoritarianisme tersebut menghadirkan perlawanan dan kebencian masyarakat yang hanya bisa disalurkan lewat makanan.

“Kalau orang tak punya biaya untuk main tenis, cukup beli bakso bola tenis. Orang nadak bisa melawan terpedo, cukup beli satai terpedo sehingga mereka telah mengunyah-ngunyah tank dan terpedo. Macam-macam orang bikin nama makanan, sekadar untuk melampiaskan dendam. Ada Ronda Kemul, ada Semar Mendem, ada Bol Cino”.

(Nadjib, 2019, hal. 78–79)

Selain soal pembredelan tersebut, rezim juga melakukan tindakan kecurangan dalam proses pemilihan umum. Hal itu tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan.

Di Karang Kedempel, segala sesuatu dipaksakan, tapi cara pemaksaannya sangat halus dan menggunakan teori-teori kultural.

Pak Kades selalu menyebut-nyebut soal musyawarah mufakat, tapi segala urusannya sudah dipersiapkan secara curang untuk nanti secara wadak bisa disebut musyawarah mufakat. Padahal sebenarnya semu.

(Nadjib, 2019, hal. 52)

Enam kali pemilu pada zaman orde baru dinilai pemilu yang tidak demokratis (Andeson dalam (Mujani, dkk., 2012, hal. 43). Hal ini sejalan dengan Friyanti dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa pemilihan umum yang diadakan selama masa Orde Baru dilakukan secara tersentralisasi di antara lembaga birokrasi sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur nilai demokratis dalam proses penghitungan suara. Institusi-institusi itu tidak hanya bertanggung jawab atas hampir seluruh proses pemilu, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan kemenangan partai politik yang dipimpin pemerintah.

Sistem birokrasi yang kuat pada masa Orde Baru berupaya mengendalikan pembangunan dengan memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan di lingkungan aparat pemerintah. Hal ini seolah memberikan ruang tersendiri bagi penguasa untuk memperkuat kekuasaan pribadi tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Pola pemerasan dan korupsi kerap terjadi di tubuh birokrasi karena keterikatan personal yang kuat di atas kepentingan rakyat. Keadaan ini pula yang memungkinkan timbulnya berbagai praktik oligarki dan kolusi yang justru merugikan rakyat banyak. Padahal, pembentukan birokrasi yang kuat diawali dari niat mulia, yaitu membangun negeri secara merata melalui program-program pembangunan. Sayangnya, pelaksanaannya justru mengalami

penyimpangan akibat kesenjangan antara idealisme dan realitas politik di lapangan.

Melalui tokoh Punakawan, Cak Nun meleburkan dirinya melakukan kritikan sekaligus resistensi terhadap ideologi dominan, yaitu rezim penguasa. Tokoh Punakawan dimunculkan oleh pengarang sebagai intelektual organis yang menyebarkan ideologi kepada masyarakat.

“Kiai semar itu hadir di negeri Karang Kedempel untuk memulai lagi pembagian kekasaan secara adil dan merata.

(Nadjib, 2019, hal. 81)

Gareng itu bukan manusia. ia hanya aspirasi, hanya ide, hanya butir kearifan, dan semangat hidup yang kekal—yang boleh dilembagakan menjadi sosok pincang hidung terong seperti yang selama ini diketahui orang bernama gareng. Bisa juga diwujudkan dalam modus yang berlainan. Bergantung pada apa tekanan politiknya.

(Nadjib, 2019, hal. 41)

Gareng membuktikan bahwa matanya yang juling justru melambangkan tingkat kepekaan dan keawasan yang tinggi terhadap rahasia-rahasia sejarah. Petruk si pengalah lebih transendental, lebih mengatasi dan lebih dingin sehingga bisa disumbangkannya banyak metode perubahan. Dan Bagong, tidak sekadar meminta rokok, minta sanga dan pakaian bekas, lantas mengamuk; ia mulai menunjukkan bahwa pada saatnya ia amat militan dan tegas.

(Nadjib, 2019, hal. 71)

Penggambaran Kiai Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dalam novel *Arus Bawah* sebagai penyeimbang hegemoni penguasa. Sebagaimana dijelaskan pada kutipan di atas bahwa tugas seorang punakawan adalah menemani dan menggembalakan kaum penguasa menuju jalan yang benar. Bisa dikatakan bahwa ke-Punakawan-an adalah kontrol sosial, bukan kesetiaan buta atau sikap menerima ketidakbenaran. Selain itu, Ke-Punakawan-an adalah semangat perjuangan Indonesia yang harus ada di dalam hati setiap orang yang berasal dari semangat Pancasila.

Kalau peran dan fungsi semacam itu tak bisa dihidupkan di dalam aliran darah masyarakat Karang Kedempel, sesungguhnya mereka telah kehilangan Bima, Ontoseno, Sisanggeni, serta para Punakawan.

(Nadjib, 2019, hal. 71)

Pengarang, melalui tokoh Punakawan, mengontestasikan dan menegosiasikan ideologi-ideologi, seperti humanisme, nasionalisme, dan sosialisme kepada masyarakat pembaca untuk melawan pemerintah (kaum dominan) yang memegang hegemoni negara pada masa itu. Hal ini dilakukan oleh kaum subaltern sebagai bentuk pemberontakan atas ketidakadilan dan keterindasan yang diterima masyarakat pada rezim Orde Baru. Tokoh Punakawan sebagai counter hegemoni, bagian masyarakat yang menentang pemerintah, mencoba menandingi ideologi pemerintah, yakni militerisme.

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Punakwan merupakan salah satu bentuk negosiasi ideologi, yaitu serangkaian usaha atau langkah-langkah untuk menggabungkan ideologi suatu kelompok tertentu dengan ideologi yang berbeda agar terbentuk ideologi baru yang dapat mencakup

berbagai sudut pandang. Munculnya ideologi baru tersebut bukan bertujuan untuk menyingkirkan ideologi-ideologi yang sudah ada yang telah berkembang di masyarakat, melainkan mengubah ideologi-ideologi tersebut dengan memilih unsur-unsur yang paling kuat agar dapat membentuk kelompok besar yang kokoh dan solid (Astuti, 2014, hal. 132).

Tokoh Punakawan berupaya mengompromikan gagasan-gagasan ideologis terhadap sikap dan pendirian Pak Kades serta Pak Jogoboyo yang bersikeras memegang teguh ideologi militerisme yang menjadi ideologi dominan saat itu. Negosiasi dilakukan melalui setiap bait puisi di dalam novel dalam rangka melawan kelompok yang berkuasa yang selama ini menindas rakyat. Di dalam puisi tersebut, pemerintah (penguasa) tidak memberi kebebasan kepada masyarakat. Rakyat hidup dalam belenggu. Setiap tindakan yang mereka lakukan harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan penguasa.

Dalam kapasitasnya sebagai intelektual organik, Cak Nun mengadopsi nasionalisme-humanis sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat untuk melepaskan diri dari belenggu. Namun demikian, ideologi yang diperdebatkan oleh pengarang tersedia untuk pembaca. Pembaca dapat memilih untuk menerima atau tidak ideologi tersebut karena tujuan mereka adalah untuk memberikan perspektif baru yang akan memperbaiki moral, sikap, dan cara berpikir masyarakat yang pada akhirnya untuk kepentingan mereka sendiri.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas ditemukan formasi ideologi antara tokoh

Punakawan (refleksi dari masyarakat subaltern) dengan tokoh Pak Kades dan Jogoboyo (refleksi dari penguasa/pemerintah), yaitu: tokoh Punakawan menghadirkan ideologi nasionalis-humanis yang terwujud dalam nilai Pancasila terhadap ideologi dominan yang terefleksi melalui tokoh Pak Kades dan Jogoboyo, yaitu militerisme.

Cak Nun sebagai intelektual organik ingin menegosiasikan ideologi nasionalis-humanisme berdasarkan penindasan oleh penguasa. Ideologi dinegosiasikan merupakan bentuk penawaran kepada masyarakat pembaca. Diterima ataupun tidaknya ideologi tersebut sebagai upaya memberikan pandangan baru kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan, yaitu sikap/moral dan cara berpikir masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Selama semangat Punakawan tidak punah dalam diri manusia, selama itu pula hegemoni Pak Kades dan Jogoboyo bisa diperangi—sampai kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, H. (2019). Formasi dan Negosiasi Ideologi: Kajian Hegemoni Gramsci dalam Cerpen "Sarman" Karya Seno Gumira Ajidarma. *Totobuang*, 7(1), 157–169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26499/ttbng.v7i1.139>
- Anggreini, H., Harahap, M., & Jakaria. (2020). Negosiasi Ideologi Puisi "Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana" Karya K.H. A. Mustofa Bisri: Kajian Hegemoni Gramsci. *Kandai*, 16(2), 245–258.
<https://doi.org/10.26499/jk.v16i2.2329>

- Astuti, W. W. (2014). Formasi ideologi pada Cerpen "Dzikir Sebutir Peluru" Karya Agus Noor: Analisis Hegemoni Gramscian. *Medan Makna*, 12(2), 121–134. <https://core.ac.uk/download/pdf/229285656.pdf>
- Faruk, F. (2013). *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruk, F. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pelajar.
- Gusmian, I. (2004). *Pantat Bangsaku: Melawan Lupa Di Negeri Para Tersangka*. Galang Press.
- Harahap, M., Anggreini, H., & Jakaria, J. (2024). Negosiasi Ideologi dalam Antologi Puisi Lepas Muasal Karya Seiska Handayani: Kajian Hegemoni Gramsci terhadap Wacana Perempuan. *IdeBahasa*, 6(2), 314–321. <https://jurnal.idebahasa.or.id/index.php/IdeBahasa/article/view/231/124>
- Harjito. (2022). *Student Hijo karya Marco Kartodikromo Analisis Hegemoni Gramscian*. Universitas Gadjah Mada.
- Hatmoko, M. D., Sumartini, & Mulyono. (2014). Hegemoni Moral Nyai Kartareja Terhadap Srintil Dalam Novel Jantera Bianglala Karya Ahmad Tohari : Kajian Hegemoni Gramsci. *Jurnal Sastra Indonesia*, 3(1), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/3993/3624>
- Homba, C. V., & Dawa, W. (2015). Kontestasi Ideologi dalam Cerpen Boikot Karya Putu Wijaya: Sebuah Kajian Menggunakan Teori Hegemoni Gramsci. *Sintesis*, 9(2), 83–92. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/916>
- Mujani, S., & Dkk. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Mizan Publika.
- Nadjib, E. A. (2019). *Arus Bawah*. Bentang Pustaka.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Patria, N., & Arief, A. (2009). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Salam, A. (2020). *Sosiologi Kehidupan*. Gambang Buku Budaya.
- Satindra, G. D. (2020). *Kritik sosial dan estetika kritik dalam novel arus bawah karya Emha Ainun Nadjib*. Universitas Negeri Malang.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Insist.
- Storey, J. (2003). *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Jalasutra.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Udasmoro, W. (2012). *Buku Ajar Pengkajian Sastra: Bagaimana Meneliti Sastra? Mencermati Metodologi Dasar dalam Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Program Studi Sastra Perancis FIB UGM.
- Wijayanto, W. A. (2020). *Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Arus Bawah Karya Emha Ainun Najib dan Relevansinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA dengan Pendekatan Stilistika*. Universitas PGRI Yogyakarta.